



## **Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama (Kajian Historis Tentang Perjalanan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama)**

Fajar Al Mahmudi<sup>1\*</sup>, Agung Pangeran Bungsu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

### **ABSTRAK**

*Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Pasca kemerdekaan masa pemerintahan di Indonesia dikenal dengan sebutan orde lama. Pemerintahan pada masa ini dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno semenjak tahun 1945-1966. Indonesia pada masa ini tengah berjuang untuk mampu berbenah, memperbaiki, dan mengatur ulang tatanan negara dari berbagai aspek. Ideologi negara, ekonomi rakyat, pembangunan, tak kalah penting tentang Pendidikan. Walaupun dalam keadaan yang tengah hiruk pikuk, pemerintah pada masa orde lama mampu memberikan fokus dan perhatian terhadap Pendidikan, termasuk Pendidikan Islam. Berbagai kebijakan dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah terkait kebijakan Pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Teknik kepustakaan/library research. Data-data dikumpulkan dari berbagai sumber kaitannya dengan kebijakan Pendidikan Islam pada masa orde lama lalu ditampilkan sebagai hasil rangkuman penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan orde lama mampu menetapkan kebijakan Pendidikan Islam yang baik pada saat itu. Walaupun Indonesia dalam keadaan kacau dalam berbagai aspek pasca kemerdekaan, namun terkait Pendidikan Islam pemerintah mampu memberikan kebijakan yang sangat baik. Kebijakan Pendidikan Islam yang ditetapkan pada masa itu diantaranya; menjadikan pelajaran Agama sebagai mata pelajaran yang wajib diadakan dan dilaksanakan di sekolah Indonesia, baik sekolah dasar hingga Pendidikan tinggi. Kebijakan-kebijakan lainnya pun ditetapkan guna mengembangkan dan memantapkan Pendidikan Islam.*

**Kata Kunci:** Orde lama, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam

**ABSTRACT**

*On August 17, 1945, Indonesia proclaimed itself an independent nation. After independence, the period of government in Indonesia was known as the old order. The government at this time was led by Indonesia's first President Soekarno since 1945-1966. Indonesia is currently struggling to be able to reform, repair and reorganize the state structure from various aspects. State ideology, people's economy, development, and education are no less important. Even in a tumultuous situation, the government during the old order was able to provide focus and attention to education, including Islamic education. Various policies were issued and stipulated by the government regarding Islamic Education policies. This research is qualitative research with a library research technique approach. The data was collected from various sources in relation to Islamic education policies during the Old Order and was presented as a research summary. The results of the research found that the Indonesian government during the Old Order was able to establish good Islamic education policies at that time. Even though Indonesia was in a state of chaos in various aspects after independence, regarding Islamic education the government was able to provide very good policies. The Islamic Education Policies established at that time included; making religious studies a subject that must be held and implemented in Indonesian schools, both elementary schools and higher education. Other policies were also established to develop and strengthen Islamic education.*

**Keywords:** *Old Order, Education Policy, Islamic Education*

**1. Pendahuluan**

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak bisa lepas dari peran Pendidikan. Karena pendidikanlah yang mampu melahirkan pribadi manusia menjadi berkarakter, cinta tanah air dan berkepribadian luhur. Secara khusus Pendidikan Islam di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang. Pendidikan Islam di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan semenjak masa penjajahan oleh kolonial yang menginjakkan kaki di Indonesia. Perjalanan panjang ini menjadi sejarah yang cukup menarik untuk dikaji dan didalami.

Indonesia dalam perjalanannya masa pemerintahannya pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 mengalami 3 masa yang cukup dikenal, yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan masa Reformasi. Masa orde lama dimulai pada tahun 1945-1966 atau dikenal dengan sebutan masa kepemimpinan Soekarno. Orde baru merupakan masa pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966-1998. Sedangkan masa reformasi adalah masa pemerintahan Indonesia yang masih bertahan sampai saat ini (Salsabila et al, 2021). Pada Setiap masa pemerintahan tersebut memiliki ciri khas tersendiri terkait perkembangan dan kebijakan Pendidikan Islam. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana perjalanan kebijakan pendidikan Islam pada masa orde baru. Pembahasan ini menarik untuk dibahas dikarenakan masa orde lama merupakan masa ketika bangsa Indonesia masih tertatih-tatih untuk berdiri diatas

kemampuannya sendiri pasca memproklamkan kemerdekaan. Pemerintah tidak hanya berfokus kepada penataan Negara, politik, dan ekonomi, juga harus bertanggung jawab atas pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia (Mudzakkir, 2015).

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian pustaka/*library research*. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian, dari buku-buku terkait, penelitian terkait, dan juga jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang akan dibahas (Matthew et al, 1992). Selanjutnya data-data yang sudah dikumpulkan akan diolah dan ditampilkan sesuai dengan tema pembahasan terkait Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama di Indonesia.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Masa Orde Lama**

Masa orde lama merupakan sebutan untuk menjelaskan keadaan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh presiden pertama pasca memperoleh kemerdekaan dari penjajah. Lebih mengerucut lagi istilah ini disematkan pada masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang memimpin Negara Indonesia mulai tahun 1945 sampai tahun 1965, atau tepatnya pada tanggal 11 maret 1965 (Nata, 2004 ). Semangat yang dibawa pada masa ini senantiasa berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 yang mengisyaratkan untuk dihilangkannya segala bentuk diskriminasi dan penjajahan serta perbuatan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karenanya para tokoh bangsa pada masa ini berusaha membentuk dan menciptakan tatanan kenegaraan yang baik, sesuai dengan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia.

Masa ini berbagai ideologi diperkenalkan kepada bangsa Indonesia guna memilih ideologi mana yang cocok untuk diterapkan di negeri ini. Terdapat beberapa ideologi yang saat itu dikenal luas oleh masyarakat dunia, diantaranya adalah ideologi sosialisme, yaitu paham yang menolak adanya kepemilikan pribadi dan mendukung sepenuhnya hak miliki bersama. Ideologi ini meyakini bahwa kepemilikan bersama akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran, dikarenakan setiap lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. Sebaliknya ideologi ini percaya bahwa hak milik pribadi akan menumbuhkan sifat egoisme yang akan menyebabkan hancurnya sebuah Negara (Wiratama et al, 2021). Kemudian terdapat pula ideologi komunisme, yaitu sebuah ideologi yang saat ini dilarang ada di Indonesia yang memiliki ajaran sama dengan aliran sosialisme yang berpijak pada kebutuhan ekonomi untuk bersama. Adapun praktik ideologi komunisme berpijak kepada politik yang mengutamakan kepentingan bersama dan menghindari hak sipil dan politik individu (Bayu, 2021).

Ideologi berikutnya yang berkembang ditengah bangsa Indonesia pada saat itu adalah paham Nasionalisme, yaitu sebuah paham atau ideologi yang mempertegas bahwa seluruh masyarakat di Indonesia adalah sama dalam keanggotaan dan kewarganegaraan. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara atas segala sesuatu lainnya (Anggraeni, 2004). Indonesia pada saat itu juga mengenal ideologi Marhaenisme, yaitu paham yang diperkenalkan langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam pandangan Soekarno Marhaenisme merupakan

ideologi yang menempatkan semua lapisan masyarakat dalam posisi yang sama dalam hal ekonomi, baik yang memiliki alat untuk produksi atau tidak. Paham ini mempertegas bahwa kemiskinan yang terjadi diakibatkan sumber kekayaan ekonomi masyarakat dirampas secara paksa, lalu masyarakat dipaksa untuk bekerja. Maka Marhaenisme datang untuk menolak keadaan tersebut (Padma, 1965).

Indonesia selanjutnya mengenal ideologi Islamisme, yaitu paham yang meyakini dan memahami bahwa Islam adalah sumber yang ideal untuk dijadikan tumpuan dalam mendirikan dan menjalankan sebuah Negara. Paham ini muncul di Indonesia dengan berpijak kepada semangat yang dijalankan oleh Rasulullah ketika membangun negeri Madinah. Sehingga mereka berpaham bahwa Negara yang ideal adalah Negara yang berdasarkan syariat Islam atau dikenal dengan sebutan Nizham al Islam (Mahmudah, 2018). Ideologi berikutnya yang ditawarkan pada bangsa Indonesia pada saat itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan paham yang mengajarkan bahwa Negara Indonesia harus berdiri dan berjalan sesuai dengan ciri bangsa, serta berlandaskan kepada nilai-nilai luhur, berpijak pada identitas dan karakteristik bangsa yang terdapat pada 5 sila pada Pancasila (Widiatama et al, 2020).

Berbagai macam ideologi yang muncul pada masa ini menemani perjalanan bangsa Indonesia untuk menemukan falsafah yang tepat bagi Negara Indonesia, sebelum akhirnya bangsa Indonesia menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai rujukan dan falsafah dalam berbangsa dan bernegara. Secara spesifik pemerintahan orde lama dapat digambarkan melalui beberapa keadaan; *pertama*, masa kekuasaan Soekarno pada tanggal 5 juli 1959 ketika ia mengumumkan Dekrit Presidennya yang memuat perintah untuk membubarkan konstituante, menggunakan kembali UUD 1945, ditolaknya UUDS 1950 dan dibentuknya MPRS dan DPAS (Indrayana, 2007). *Kedua*, masa orde dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pada tahun 1950-1957 dengan sistem Demokrasi Parlementer dan pada tahun 1959-1965 dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi parlementer adalah masa demokrasi yang mengedepankan peran parlemen dan partai-partai yang ada masa itu (Noviati, 2018). Sedangkan demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi rakyat yang menaungi perbedaan yang ada ditengah rakyat dan menjadikannya satu tujuan utuh untuk kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara (Indrajat, 2016). *Ketiga*, orde lama digambarkan sebagai sebuah masa perebutan kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia dari Belanda dan Jepang. Selanjutnya dilanjutkan dengan Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan ditutup dengan kediktatoran Soekarno sebelum ditumbangkan pada 11 Maret 1965 melalui Supersemar (Indrayana, 2016).

### **3.2. Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Lama**

Perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika naskah Proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Setelah upacara pembacaan Proklamasi tersebut maka bangsa Indonesia telah berani menyatakan merdeka dan mempertegas bahwa akan mampu mengurus Negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Berbagai pembenahan dilakukan oleh bangsa Indonesia guna memperbaiki dan menjalankan Negara yang baru merdeka. Pemerintah mulai berfokus kepada sistem pemerintahan untuk menemukan model pemerintahan yang cocok untuk Indonesia. Pemerintah juga berusaha

menemukan ideologi dan falsafah Negara sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Politik juga menjadi fokus pemerintah. Indonesia juga berbenah guna menemukan sistem ekonomi yang cocok untuk rakyat, dan tidak luput pula Negara Indonesia memikirkan dan memberikan perhatian tentang pendidikan bagi segenap masyarakat Indonesia (Muzammil, 2016).

Kaitannya dengan kebijakan pada bidang pendidikan, Negara memfokuskan pada hal yang paling mendasar yaitu menemukan format pendidikan yang tepat bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa. Maka dalam hal ini penekanan yang diperhatikan oleh Negara adalah terkait landasan pendidikan, tujuan pendidikan, format sistem pendidikan, dan sejauh mana kesempatan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan (Gunawan, 1986).

Berdasarkan pemetaan fokus pendidikan diatas, selanjutnya pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan, yaitu menjadikan Pancasila sebagai landasan idiil pendidikan di Indonesia. Walaupun sempat mengalami perubahan falsafah Negara sebagaimana disebutkan sebelumnya, akhirnya pemerintah memantapkan pancasila sebagai falsafah Negara yang tepat bagi Indonesia. Sehingga dalam pendidikan pun pemerintah menetapkan Pancasila sebagai landasan utama (Muzammil, 2016). Setelah menemukan falsafah yang tepat sebagai sumber nilai dalam pendidikan, selanjutnya pemerintah memfokuskan pendidikan sesuai dengan kehendak masyarakat yaitu seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pengajaran dan Pemerintah bertugas untuk membuat suatu sistem pengajaran Nasional dan diatur dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 31 (Sudardja, 1984). Setelah menyelesaikan kebijakan pendidikan terkait landasan nilai, selanjutnya pemerintah membentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia, Menteri pertama yang menjabat pada Kementerian ini adalah Ki Hajar Dewantara (Muzammil, 2016).

Berpegang kepada falsafah Negara Ki Hajar Dewantara memerintahkan para kepala sekolah dan guru untuk: wajib mengibarkan bendera merah-putih di halaman sekolah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tidak mengibarkan bendera Jepang dan tidak menyanyikan lagu kebangsaannya, menghilangkan segala pelajaran yang berkaitan dengan Jepang, dan menanamkan nilai kebangsaan kepada para siswa (Djumhur dan Danasaputra, 1979). Pada masa pemerintahan orde lama secara lebih spesifik terdapat beberapa kebijakan di bidang pendidikan. *Pertama*, pada tahun 1945 sampai tahun 1950 pemerintah Indonesia memutuskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan nilai pada pendidikan di Indonesia. *Kedua*, Negara Indonesia sempat menjadi Negara serikat pada tahun 1949, yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan pendidikan pada saat itu. Indonesia bagian timur memilih untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan warisan Belanda. *Ketiga*, Negara Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan dan menjadikan undang-undang dasar sementara Republik Indonesia (UUDS) sebagai falsafah pendidikan (Muzammil, 2016). *Keempat*, Presiden Soekarno melalui dekritnya kembali menetapkan pengembalian UUD 1945 sebagai falsafah Negara dan memperkenalkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana pada dunia pendidikan. Sapta Usaha Tama merupakan instruksi yang dikeluarkan oleh menteri PP dan K ketika dijabat oleh Prijono dan berisi tentang; penertiban aparatur dan usaha kementerian PP dan K, lembaga pendidikan melaksanakan



kesenian dan olahraga, adanya usaha halaman, mewajibkan penabungan di lembaga pendidikan, adanya kelas masyarakat, dan membentuk regu pekerja di kalangan SLA dan Universitas. Adapun Panca wardana merupakan satu ketetapan pada pendidikan Nasional yang berisi; menanamkan cinta bangsa dan tanah air, moral dan keagamaan, mengembangkan pengetahuan, menumbuhkan rasa pada lahir dan batin, mengembangkan kerajinan tangan dan sehat jasmani (Subkhan, 2018). *Kelima*, pemerintah memutuskan secara tegas dan konsekuen untuk menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah Negara dan pendidikan, sebagai dampak dari peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965 (Zahara, 1981).

Jika dirangkum secara lebih terperinci, maka perjalanan tentang kebijakan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua tahapan.

*Tahapan pertama*, yaitu pendidikan Indonesia pada tahun 1945-1950. Pada masa ini sistem pendidikan Indonesia masih sempat mengikuti warisan Jepang, yaitu satu sekolah dengan tiga tingkatan pendidikan. Namun pada masa ini pemerintah telah mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan telah menghapus semua pelajaran dan kebiasaan dilingkungan sekolah yang berkaitan dengan Jepang (Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari, 2016). Pada tahap ini tingkatan pendidikan di Indonesia dimulai dengan Sekolah Rakyat (SR). dilaksanakan selama 6 tahun dan kurikulumnya disusun berdasarkan Permen PK dan K tanggal 19 November 1946 Nomor 1153/Bhg A. Tingkatan berikutnya adalah Pendidikan Guru. Selanjutnya tingkatan Pendidikan Umum, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Lembaga pendidikan berikutnya adalah pendidikan Kejuruan, yang pada saat itu hanya berfokus pada pendidikan ekonomi dan kewanitaian saja. Berikutnya pendidikan Teknik yang meliputi Kursus Kerajinan Negeri, Sekolah Teknik Pertama, Sekolah Teknik, dan Sekolah Teknik Menengah, lalu Pendidikan Guru Sekolah Teknik. Pada level Pendidikan Tinggi, Indonesia pada saat itu telah mengadakan Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi Republik, dan Pendidikan Tingkat Tinggi Pendudukan Belanda (Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari, 2016).

*Tahapan kedua*, yaitu pendidikan Indonesia dilaksanakan pada tahun 1950-1966. Pada masa ini pendidikan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pasca Konferensi Meja Bundar 1949 Indonesia menjadi Negara Republik Serikat, yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk pemerintahan yang seperti ini, Indonesia mengatur pula tentang Pendidikan sebagaimana yang terdapat pada pasal 30 UUDS 1950 Ri tentang setiap warga berhak mendapat pengajaran, bebas mengikuti pelajaran yang diinginkan, dan bebas dalam mengajar (Muhammadi, 2016). Pada masa ini pendidik dan peserta didik memiliki idealisme yang cukup tinggi. Semboyan "Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" muncul pada masa ini, sebagai penegasan bagaimana kesungguhan para guru dalam mendidik calon pemimpin bangsa. Inilah cita-cita Pendidikan yang diusahakan pada masa orde lama, yaitu melahirkan pribadi masyarakat yang kuat, berdemokrasi dan cinta tanah air (Rifa'i, 2016).

### **3.3. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama**

Secara garis besar pendidikan Islam pada masa orde lama belum mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Hal ini disebabkan kondisi bangsa Indonesia yang masih harus berjuang guna memulihkan keadaan Negara pasca kemerdekaan. Terjadi hiruk pikuk yang cukup besar ditengah kehidupan bangsa, sehingga pemerintah pada masa ini lebih berfokus kepada

perbaikan segala sistem yang mampu memperkuat kekuatan bangsa. Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar pada sistem pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan kesatuan Negara (Muhammadi, 2016). Pada masa orde lama juga masih terjadi perang ideologi yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan dan falsafah Negara. Sehingga kelompok Islam yang berjuang untuk menjadikan Islam sebagai falsafah Negara senantiasa harus bersinggungan dengan para Nasionalis yang mengedepankan persatuan atas nama bangsa daripada agama. Dan Sekularis-Komunis yang terus mengedepankan pemikiran ekonomi kenegaraannya. Hal ini terus terjadi pada masa orde lama samapi Indonesia menemukan falsafah yang tepat untuk Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 (Muhammadi, 2016).

Kaitannya dengan pendidikan Islam, pada masa penjajahan, praktek pendidikan Islam telah dijalankan dan diselenggarakan oleh tokoh elit Muslim di Indonesia. Keadaann ini bahkan membuat penjajah Belanda merasa tidak suka dan tidak nyaman dengan keberadaan lembaga pendidikan ini karena dianggap sebagai pusat gerakan pemberontak terhadap kolonial. Akibat adanya sentiment dari Belanda ini membuat lembaga pendidikan Islam enggan berkejasama dengan Belanda, namun mendorong para santri dan siswa untuk belajar dan berjuang untuk mengusir para penjajah. Semangat pendidikan Islam yang ada pada saat itu lantas menjadi pilar untuk membentuk suatu kebijakan pendidikan yang mampu melahirkan kader pemimpin bangsa yang agamis, nasionalis dan berjiwa merah putih (Muzammil, 2016).

Pasca kemerdekaan atau pada masa pemerintahan orde lama, pemerintah membentuk Departemen Agama, yang diantara tugasnya adalah menjadi penanggung jawa dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Kementerian Agama berdiri pertama sekali pada 3 Januari 1946 (Mudzakkir, 2015). Selanjutnya Kementerian Agama memberikan masukan kepada Kementerian PK dan K untuk mengganti pelajaran budi pekerti yang merupakan warisan Jepang, untuk selanjutnya diganti dengan pendidikan Islam. Kebijakan ini lantas mulai dilaksanakan pada Desember 1946. Kebijakan selanjutnya terkait pembinaan lembaga pendidikan adalah melalui Kementerian Agama dan Kementerian PP dan K, Kementerian menghimbau agar pemerintah mau memberikan perhatian lebih kepada pelaksanaan pendidikan Islam dan juga kepada lembaga pendidikan Islam baik Madrasah maupun Pesantren. Hal ini dapat terlihat jelas sebagaimana yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1945 ketika Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) menyampaikan bahwa Madrasah dan Pesantren merupakan lembaga yang senantiasa ada untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karenanya BPKNP berpendapat sudah selayaknya Madrasah dan Pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam mendapatkan perhatian lebih dari Negara (Djaelani, 1980).

Kementerian Agama selanjutnya meminta kepada Pesantren dan Madrasah yang masih tradisional agar berkembang menjadi lebih maju, agar mampu bersaing dengan keadaan zaman, namun tetap mempertahankan model pembelajaran klasikalnya. Kebijakan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama adalah meminta Pesantren dan Madrasah untuk memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam kurikulum lembaga pendidikan. Dari sini maka dikenal pada masa orde lama, pemerintah berhasil membuat lembaga pendidikan Islam yang moderat yaitu Pendidikan guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Lebih jauh pada tahun 60 an lembaga

pendidikan Islam berupa Madrasah sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia (Salsabila et al, 2021).

Sempat terjadi gesekan dalam perjalanan kebijakan pendidikan Islam pada masa orde lama disebabkan pada masa ini Indonesia dipengaruhi oleh 3 paham yang sangat kental, yaitu Nasionalis, Sekularis-Komunis, dan Islamis. Ketiga paham ini sering mengalami benturan dan saling singgung sehingga menyebabkan keadaan politik pada masa orde lama begitu menegangkan. Presiden Soekarno sendiri terkadang dekat dengan paham Islamis, namun terkadang Soekarno dekat dengan Sekularis-Komunis ketika membahas tentang ekonomi Negara (Muzammil, 2016). Dalam keadaan demikian Pemerintah Indonesia tetap memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Diantara kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Desember 1946 antara Kementerian Agama dengan Kementerian PK dan K yang memerintahkan agar adanya pelajaran agama Islam disekolah umum dan sebaliknya, diadakan pendidikan umum disekolah atau lembaga Pendidikan Islam baik Madrasah ataupun Pesantren. Dapat disimpulkan pada masa ini pendidikan di Indonesia mengalami dualisme, yaitu penggabungan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum (Sudarmono, 2020).

Kebijakan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde lama terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab XII pasal 20 yang berisikan perintah kepada sekolah negeri dan orang tua murid agar senantiasa mendorong anaknya dan para siswa untuk belajar Agama. Selanjutnya mempertegas kepada sekolah-sekolah terkait pelaksanaan pelajaran agama dan umum sebagaimana yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kementerian PK dan K.

Kementerian Agama bersama Kementerian PK dan K selanjutnya mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan agama yang terdapat pada Permen bersama Kementerian Agama bersama Kementerian PK dan K nomor 1432 tanggal 20 Januari 1951. Pasal pertama berisi tentang kebijakan untuk memerintahkan sekolah rendah dan sekolah lanjutan untuk diadakan pendidikan agama. Pasal kedua pendidikan agama disekolah rendah dilaksanakan 2 jam dalam seminggu dan dimulai pada kelas 4. Pada lembaga pendidikan tertentu, pendidikan agama dapat dimulai dari kelas 1 dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 jam dalam seminggu. Pasal ketiga berisi kebijakan tentang sekolah-sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas baik umum ataupun kejuruan agar dilaksanakan pendidikan agama sebanyak 2 jam dalam seminggu. Dan pasal keempat berisi kebijakan tentang pendidikan agama dilaksanakan sesuai agama masing-masing, diberikan kepada kelas yang memiliki minimal 10 siswa dengan agama yang sama, murid yang berbeda agama boleh meninggalkan kelas ketika pelajaran agama lain sedang diajarkan (Sudarmono, 2020).

Adapun kaitannya dengan kurikulum pendidikan Agama Islam. pemerintah menugaskan KH Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Ponorogo, untuk selanjutnya dibentuk sebuah kepanitiaan dan membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. pada akhirnya disahkan oleh Kementerian Agama pada tahun 1952. Diantara isi dari keputusan terkait kurikulum tersebut adalah rakyat Indonesia berhak menjalankan kegiatan keagamaannya untuk menjaga kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia dari pengaruh budaya asing.



Selanjutnya isi keputusan ini adalah pelajaran Agama mulai diajarkan dari sekolah dasar hingga ke pendidikan tinggi (Sudarmono, 2020).

Puncaknya diakhir tahun 1960 an atau di penghujung masa pemerintahan orde lama, umat Islam mulai mengembangkan lembaga pendidikan Islam dengan melahirkan beberapa lembaga pendidikan Islam yang lebih maju seperti, Pesantren Indonesia Klasik, Madrasah Diniyah, Madrasah Swasta Modern, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan Pendidikan tinggi dengan sebutan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Sudarmono, 2020).

#### 4. Kesimpulan

Pemerintahan Indonesia pada masa orde lama berada dalam keadaan yang cukup rumit. Karena berbagai aspek dalam bernegara harus dibenahi oleh pemerintah pada saat itu. Namun demikian pemerintah tetap berusaha memberikan perhatian secara tersendiri untuk perkembangan Pendidikan Islam, diantaranya dengan menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan terkait Pendidikan Islam.

Kebijakan yang cukup menarik adalah ketika pemerintah Indonesia melalui pada tanggal 3 Januari 1946 membentuk Kementerian Agama yang salah satu tugasnya memberikan perhatian kepada Pendidikan Islam. Kementerian Agama berkerjasama dengan Kementerian PK dan K lantas mengeluarkan keputusan Bersama untuk menjadikan Pendidikan Islam sebagai pelajaran wajib yang ada di Lembaga Pendidikan pada saat itu. Berbagai kebijakan pendidikan Islam lainnya juga diterapkan pada masa orde lama sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap Pendidikan Islam.

#### Daftar Pustaka

- Cahyaningtyas, Padma, Djono, dan Tri Yuniyanto. "Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950-1965." *Jurnal Candi* 20, no. 2 (2020): 54-69.
- Djaelani, Timur. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Bangunan Perguruan Agama*. Jakarta: Dermaga, 1980.
- Djumhur, I, dan Danasaputra. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu, 1979.
- Fadli, Muhammad Rijal, dan Dyah Kumalasari. *Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama ( Periode 1945-1966 )*. Agastya. Vol. 9, 2016.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Idris, Zahara. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: Angkasa, 1981.
- Indrajat, Himawan. "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi." *Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2016): 53-62.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Kusumawardani, Anggraeni, dan Buletin Psikologi. "Nasionalisme." *Buletin Psikologi* XII, no. 2 (2004): 61-72.
- Mahmudah, Siti. "Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 1-16.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:

- UI-Press, 1992.
- Mudzakkir. "Pendidikan Islam Masa Orde Lama Dan Orde Baru." *Jurnal Al Fatih* (2015): 55-66.
- Muzammil, As'ad. "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 2 (2016): 183.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2018): 350.
- Rifa'i, Muhammadi. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2016.
- Salsabila, Sonia Sinta, Yazida Ichsan, Adinda Icha Rohmadani, dan Safira Rona. "Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2021): 8-15.
- Subkhan, Edi. "Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965)." *Journal of Indonesian History* 7, no. 1 (2018): 19-34.
- Sudardja, Endang. *UUD RI 45 Dalam Hubungannya dengan Pendidikan Moral Pancasila*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sudarmono, Muh Aidil. "Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama." *Jurnal Ilmiah Kreatif* 18, no. 1 (2020): 17-26.  
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>.
- Wibowo, Bayu Ananto. "Ideologi Komunisme Dan Sejarah Perkembangannya Di Indonesia." *Karmawibangga: Historical Studies Journal* 3, no. 2 (2021): 63-71.
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 310.
- Wiratama, Nara Setya, Agus Budianto, dan Zainal Afandi. "Perkembangan Sosialisme Di Dunia Abad Ke-19 Serta Pengaruhnya Di Indonesia." *Danadyaksa Historica* 1, no. 2 (2021): 128-140.